

Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti

Muliono¹⁾, Nasuhaidi²⁾

^{1), 2)} Department of Social and Political Sciences, Universitas Jambi
Street of Jambi, Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, 36122
Email Korespondensi : muliono@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore the youth social movements in the electoral democracy process of 2024. The social movement was triggered by the various situations that are related to the issue of political dynasty which is seen as producing a sense of injustice and a threat to democracy existence. This study uses a qualitative approach. The data is obtained and observed from various social media reports on the protests against political dynasty issue. This study shows that the protest movement was carried out by more than 700 universities spread across various regions in Indonesia. The protest movement on the streets was dominated by the youth. This study formulates that the social movements carried out involving various framings and repertoires in building narratives for rejecting the political dynasty and demanding a systemic change. Actors in this social movements use social media as a tool for mass mobilization. However, the main challenge in this social movement comes from a strong cultural power system and a complex of democratic dynamics, which affect the results of the protest movement that carried out. Through these two challenges, the protest movement against political dynasty issue has not been so strong enough in accomodating, influencing and changing the political system will by the protesters. The contribution of this study is to expand the research issue related to new social movement that focuses on youth as movement's actors and reveal the layered barrier or challenge of social movement in the context of Indonesia's democracy.

Keywords : Youth Social Movement, Electoral Democracy, Political Dynasty

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mendiskusikan gerakan sosial diaktori oleh anak muda dalam proses demokrasi elektoral pada tahun 2024. Gerakan sosial ini dipicu oleh berbagai situasi berkaitan dengan isu politik dinasti yang menghadirkan rasa ketidakadilan dan ancaman terhadap eksistensi demokrasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data utama diperoleh dari observasi dan berbagai laporan media sosial tentang berbagai aksi protes menolak politik dinasti. Studi ini menunjukkan bahwa gerakan protes dilakukan hampir 700 lebih kampus tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan protes turun ke jalanan dominan diaktori oleh anak-anak muda khususnya dari kalangan mahasiswa. Studi ini menemukan bahwa gerakan sosial yang dilakukan melibatkan berbagai *framing* dan *repertoar* dalam membangun narasi menolak politik dinasti dan menuntut adanya perubahan yang bersifat sistemik. Aktor-aktor dalam gerakan sosial menggunakan media sosial sebagai alat mobilisasi massa. Namun tantangan utama dalam gerakan ini adalah kuatnya sistem kultur kekuasaan dan dinamika demokrasi yang kompleks, sehingga memengaruhi hasil gerakan protes yang telah diorganisir. Sistem kultur kekuasaan di Indonesia, secara historis, memiliki kecenderungan pada sistem aristokrasi yang kemudian hal ini menjadi pengaruh dan tantangan demokrasi. Melalui dua tantangan ini gerakan protes terhadap penolakan politik dinasti yang dilakukan belum begitu kuat mengakomodir, memengaruhi, dan merubah sistem politik sebagaimana yang dikehendaki oleh massa protes. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang gerakan sosial baru dengan fokus pada anak muda sebagai aktor dan serta kajian tantangan dalam gerakan sosial pada konteks demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci : Gerakan Sosial Anak Muda, Demokrasi Elektoral, Politik Dinasti.

1. PENDAHULUAN

Gerakan sosial baru ditandai dengan perkembangan karakter isu-isu mutakhir dialami masyarakat modern. Tipologi gerakan ini melampaui masalah kesenjangan ekonomi dan perjuangan kelas antara proletar dan borjuis sebagaimana tradisi dalam gerakan sosial lama (Buechler, 2015). Aktor dalam gerakan sosial baru dilakukan oleh beragam aktor. Dan, tren mutakhir dalam gerakan sosial diaktori oleh anak-anak muda dengan berbagai isu melatari mereka melakukan aksi (Mei, 2021; Earl et al., 2017; Bublitz et al., 2024). Di Indonesia, gerakan sosial baru adalah merupakan anak kandung yang lahir dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi mendorong adanya kesetaraan dan kebebasan. Reformasi tahun 1998 merupakan landasan bagi arah pembentukan tradisi demokratis di Indonesia (Prasisko, 2016).

Gerakan sosial anak muda dalam praktik demokrasi elektoral, di sisi lain, mengacu pada berbagai gerakan yang diaktori oleh generasi muda yang secara sadar terlibat dalam berbagai gerakan sosial politik. Studi ini mengambil fokus pada demokrasi elektoral pemilihan presiden 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan sosial anak muda memperoleh momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk wacana politik (Wahyuningroem et al., 2024; Miller et al., 2021) Keterlibatan mereka memperlihatkan wacana resistensi terhadap struktur kekuasaan menuntut keberpihakan yang lebih besar kepada masyarakat sipil.

Gerakan sosial anak muda memiliki karakteristik baru yang identik dengan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi massa dan memperkuat wacana mengenai isu-isu utama gerakan yang didiskusikan. Dengan kehadiran teknologi media, anak muda menghadirkan perspektif yang lebih inovatif dalam wacana perubahan sosial politik. Studi ini dimaksudkan untuk mendiskusikan gerakan sosial dalam lanskap demokrasi elektoral Indonesia tahun 2024. Gerakan ini, asumsi dasarnya, bertolak dari praktik demokrasi elektoral 2024 yang syarat bermuatan dinasti politik. Dinasti politik secara substantif mendegradasi sistem demokrasi (Ananda, 2023; Meliala & Permana, 2023). Atas dasar asumsi tersebut, aksi di berbagai daerah diaktori oleh mahasiswa yang notabene adalah anak muda melakukan aksi protes. Studi ini menarik, disamping keluasan gerakan protes di berbagai daerah, gerakan ini juga menjelaskan aktivisme anak muda tentang perjuangan keadilan, radikalisme sistem demokrasi, dan hambatan tantangan gerakan sosial dalam lanskap ke Indonesiaan.

2. LITERATUR REVIEW

Sejauh ini literatur yang mengkaji tentang gerakan sosial anak muda dapat ditelaah dari beberapa fokus bahasan sebagaimana diulas dari beberapa kajian berikut. Studi Afad (2021) tentang dinamika strategi media dalam gerakan anak muda. Kajian ini mengambil fokus kepada masa pandemi covid-19 yang memungkinkan. Selanjutnya studi Tania et al. (2019) tentang pemuda,

diaspora dan penggunaan media baru dalam gerakan sosial Sabang-Merauke. Studi ini memfokuskan bagaimana diaspora muda Indonesia menggunakan media baru untuk mendukung organisasi gerakan sosial mereka, Sabang Merauke, dan gerakan ini diorientasikan pada peningkatan pendidikan dan toleransi. Kemudian studi Addini (2019) tentang fenomena gerakan hijrah di kalangan pemuda muslim sebagai mode sosial. Studi ini mengulas bahwa gerakan ini merupakan bentuk gerakan sosial baru yang tidak saja bertujuan untuk mendekatkan generasi muda kepada Tuhan, tetapi juga merefleksikan suatu transisi simbolik dari reformasi yang lebih mendalam pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Kehidupan.

Studi yang telah ada di atas menekankan pada dua konteks, yaitu pertama, kehadiran media dalam berbagai bentuk gerakan sosial. Kedua, konteks gerakan keagamaan kontemporer yang diaktori oleh anak muda. Sementara studi ini pada dasarnya melengkapi kajian yang telah ada dan mengisi kekosongan kajian pada konteks sosial politik yang sedang berkembang terkait isu politik dinasti. Lebih lanjut studi ini tidak saja mengeksplorasi bentuk gerakan yang dilakukan tetapi juga mengungkap kecenderungan tantangan hambatan gerakan yang secara masif dilakukan dan diaktori oleh anak-anak muda.

3. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui serangkaian observasi dan berbagai laporan media sosial mengenai protes terhadap praktik politik dinasti yang dilakukan oleh hampir 700 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Studi ini penting dilakukan tidak saja karena masifnya gerakan ini dilakukan tetapi juga karena pengembangan keilmuan terhadap kajian demokrasi dan gerakan sosial dalam konteks keIndonesiaan. Berbagai data laporan dari media sosial tersebut juga dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep gerakan sosial, yaitu framing dan repertoar. Penelitian ini pada dasarnya berfokus pada analisis gerakan sosial baru dan menekankan aktornya pada anak muda. Istilah anak muda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencakup berbagai identitas yang melekat pada diri mereka sebagai mahasiswa, milenial, dan Generasi Z. Keberadaan anak muda dalam ruang sosial-politik kontemporer dengan terlibat dalam aksi-aksi gerakan sosial menjadi fenomena yang menarik untuk diperhatikan. Secara spesifik, penelitian ini akan diformulasikan ke dalam beberapa bagian, diawali dengan telaah literatur mengenai gerakan sosial pemuda, ruang virtual sebagai alat mobilisasi massa, dan gerakan protes terhadap politik dinasti. Berbagai bentuk dalam gerakan sosial seperti aksi protes, pembungkaman dan repertoar dalam gerakan protes yang dilakukan akan dikaji dalam artikel ini.

4. HASIL DAN DISKUSI

Secara historis, gerakan sosial diaktori anak muda memainkan peran penting dalam konstruksi tipologi gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru secara teoritis, muncul pada tahun 1980-an untuk menganalisis gerakan sosial yang muncul sejak tahun 1960-an (Buechler, 2019). Gerakan ini dikategorikan sebagai gerakan baru karena sebagai antitesa terhadap gerakan sosial lama yang terfokus pada konteks kelas buruh, sementara gerakan sosial baru berfokus pada konteks yang lebih luas mencakup isu-isu ras, etnisitas, gender, seksualitas, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (Buechler, 2019). Teori gerakan sosial baru dalam lanskap global banyak diterapkan untuk menganalisis berbagai bentuk gerakan di negara-negara Eropa Barat, termasuk Prancis, Jerman, Belanda, dan Swiss (Kriesi et al., 1995).

Studi ini menggunakan perspektif teori gerakan sosial baru dan menekankan bentuk *framing* dan *repertoire* dalam menganalisa gerakan sosial yang terjadi dalam konteks upaya yang dilakukan oleh aktor dalam mengkritisi praktik politik dinasti. Gerakan sosial baru mendorong terjadinya perubahan sosial, diorientasikan menjembatani hak-hak kelompok yang terpinggirkan, dan menyoroti isu-isu terbaru dialami masyarakat modern. Beberapa studi mendukung argumen ini ialah seperti studi Earl et al. (2017) tentang kehadiran dan partisipasi anak muda dalam proses politik. Eksistensi anak muda memiliki posisi penting dalam lanskap konsep gerakan sosial, utamanya berkaitan dengan masalah politik dan demokrasi. Kemudian studi Mei (2021) tentang aktivisme anak muda di Hong Kong. Gerakan sosial diaktori anak muda di daerah ini didorong oleh tiga faktor utama yang relatif sama dengan gerakan anak muda dalam lanskap global yaitu ancaman terhadap identitas sosial kolektif, keinginan untuk didengarkan di ruang publik, dan kebangkitan aktivisme secara online.

Pada konteks isu kesejahteraan, studi Bublitz et al., (2024) mendedah gerakan sosial melibatkan anak muda dalam menyoroti peningkatan kesejahteraan individu dan kolektif yang didefinisikan oleh mereka sebagai suatu perasaan atau kondisi kolektif, terhubung secara sosial, dan memiliki tujuan yang jelas ke depan tentang kehidupan yang lebih layak. Studi ini mengeksplorasi praktik gerakan sosial yang mendukung isu kesejahteraan utamanya pada kaum muda. Anak muda adalah generasi sentral dalam sejarah gerakan sosial. Studi Chock (2012) menguatkan argumen ini, bahwa anak muda menjadi sentral dari banyak aksi gerakan sosial besar sepanjang sejarah. Anak muda, oleh Chock, secara aktif terlibat dalam memobilisasi teman sebaya, keluarga, dan komunitas mereka untuk melakukan transformasi sosial ke arah yang lebih baik. Berbagai gerakan ini penting dalam menyoroti keadilan.

Studi López et al. (2022) mengulas bahwa berbagai gerakan yang diaktori oleh anak muda penting dalam masyarakat karena mereka memiliki keberanian dalam menyoroti perlawanan terhadap berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Studi Lopez lebih lanjut menjelaskan bahwa banyak dari "suara-suara" sengaja dibungkam oleh mereka yang tidak

menginginkan ketidakadilan dapat berakhir dikarenakan atas dasar kepentingan pribadi mereka dapat dimungkinkan terpengaruh. Gerakan sosial pada dasarnya menentang dan mendobrak kondisi ini, dan relevansi utama gerakan sosial diaktori pemuda terletak pada kemampuan mereka untuk mengubah suatu keadaan negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kesetaraan bagi masyarakat pada umumnya. Berbagai gerakan sosial didorong oleh idealisme dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Kajian literatur gerakan sosial anak muda di atas menjelaskan beberapa hal penting mengenai isu, arah, dan orientasi dalam memobilisasi massa mendorong perubahan berdampak lebih positif bagi masyarakat. Gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik tertentu dengan orientasi untuk menolak dan atau mendukung perubahan sosial (Zeller, 2022). Gerakan sosial melibatkan individu, kelompok dan atau organisasi untuk memobilisasi, menyoroti isu-isu kebutuhan dasar yang dianggap bermasalah, pembungkaman (*framing*), motivasi intrinsik, tindakan individu dan kolektif, serta berkaitan identitas kolektif (Grinspun et al., 2022). Hal ini menempatkan bahwa tindakan kolektif diaktori oleh kelompok yang didasarkan pada adanya kesamaan (Asrul, et al. 2024). Gerakan sosial biasanya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk aksi protes. Dan, dalam proses demokrasi elektoral 2024 di Indonesia aksi protes didorong oleh isu politik dinasti sebagai isu utama.

Pada demokrasi elektoral 2024, politik dinasti ditandai dengan kehadiran keluarga Presiden dalam pencatatan kekuasaan seiring dengan pemerintahan Jokowi. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka didaftarkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada 25 Oktober 2023. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau disingkat dengan MK yang ketuanya juga merupakan keluarga Jokowi, melakukan perubahan dengan menetapkan penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q tentang syarat ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan putusan ini pada kelanjutannya memungkinkan anak presiden Jokowi menjadi wakil presiden.

Aksi protes muncul karena hal ini dianalisa sebagai bentuk akumulasi kekuasaan tersentral terhadap satu keluarga dan melibatkan tali kekerabatan. Keluarga dan tali kekerabatan tersebut tersentral kepada kritik terhadap Jokowi sebagai presiden dua periode 2014 hingga 2024. Keluarga presiden tersebar sebagai pejabat publik di beberapa daerah, menjabat pada posisi penting di MK, partai politik, dan bahkan sebagai calon wakil presiden. Kondisi inilah menjadi dasar gerakan ini mencuat. Akumulasi kekuasaan kepada keluarga, akan cenderung menciptakan penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan jalan kerabat demi memperoleh kekuasaan. Kondisi ini diistilahkan dengan politik dinasti. Dinasti politik merupakan strategi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskannya

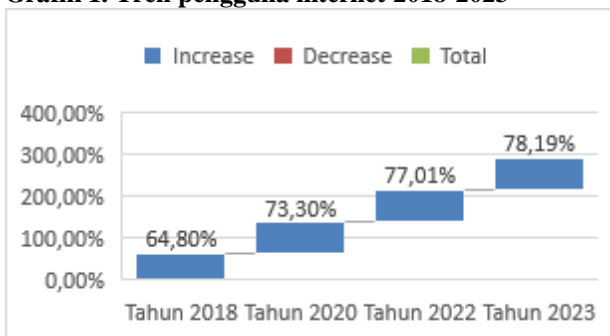
kepada sanak-kerabat. Politik dinasti pada satu sisi didorong oleh minimnya figur yang berkualitas dari partai politik dan adanya dukungan terhadap status *quo* (Effendi, 2018). Melalui sistem dinasti politik, kekuasaan diwariskan secara turun temurun kepada keturunan ataupun keluarga.

Praktik politik dinasti secara substantif mengancam demokrasi. Ancaman ini didasarkan pada nilai politik dinasti yang praktisnya membatasi hak masyarakat untuk berpartisipasi secara *fair*, karena hanya mereka dari keluarga tertentu yang memiliki akses dan kesempatan untuk memegang peranan kekuasaan. Dan, hal ini dapat mengancam prinsip dasar berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, politik dinasti menjadi dasar kuat terbentuknya oligarki politik, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Sementara rotasi kekuasaan tidak dapat berjalan dengan baik. Politik dinasti inilah menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai yang dapat berimplikasi negatif terhadap proses keadilan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang virtual sebagai arena mobilisasi gerakan sosial

Dalam melakukan gerakan penolakan politik dinasti, anak muda menggunakan platform ruang virtual dengan penggunaan media sosial sebagai sarana mobilisasi gerakan, menciptakan framing, repertoir, dan serta mengorganisir aksi protes. Ruang virtual menjadi arena penting dalam memobilisasi gerakan menolak politik dinasti. Ini dikarenakan generasi muda merupakan generasi yang melekat dengan teknologi dan media. Hampir keseluruhan kehidupan anak muda saat ini tidak bisa lepas dari gadget. Studi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menyebutkan tingkat pengguna internet Indonesia sampai pada angka 79,5%, yang menandakan bahwa adanya peningkatan konsisten tren pengguna internet Indonesia dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2018.

Grafik 1. Tren pengguna internet 2018-2023

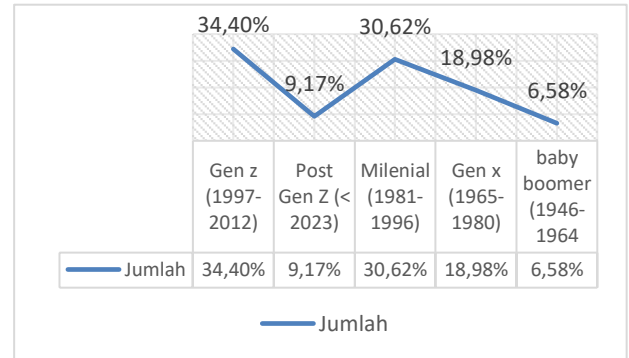


Sumber, APJII (2024)

Data di atas menarik difahami bahwa generasi muda adalah merupakan generasi dominan dalam penggunaan teknologi media internet (lihat juga grafik 2). Proses interaksi di dunia nyata dapat secara cepat dibawa ke dalam dunia virtual. Ruang virtual menjadi tempus interaksi dan secara mudah berbagai kalangan untuk terkoneksi, berbagi informasi, membangun diskursus, dan

mengorganisir gerakan protes. Kehadiran teknologi media internet membuka ruang baru aktivisme yang terjadi di dunia nyata, dapat dilakukan di ruang virtual, sekaligus sebagai salah satu platform yang efektif dalam memobilisasi gerakan.

Grafik 2. Klasifikasi pengguna media sosial



Sumber, APJII (2024)

Fakta pengguna media sosial di atas merefleksikan bahwa dalam demokratisasi yang dewasa ini melibatkan media, aktor dominan adalah anak muda. Oleh karena itu berbagai kritisisme dalam demokrasi khususnya demokrasi elektoral terdapat kecenderungan penggunaan media baik dalam bentuk membangun wacana publik maupun dalam bentuk gerakan aktivisme.

Ruang virtual, melalui media sosial, bagian integral dalam memicu pertumbuhan dan penyebaran gerakan sosial (Lee, 2020). Media sosial merupakan alat mobilisasi sosial yang efektif dan hal ini telah dilakukan diberbagai negara (Xinyue, 2023). Aspek penting ruang virtual dalam memobilisasi massa terletak pada aksesibilitas dan jangkauannya yang luas terhadap massa. Individu dapat berpartisipasi tanpa ada hambatan waktu, batas-batas geografis, dan bahkan beban biaya (*cost*).

Platform utama memobilisasi gerakan protes terhadap isu politik dinasti melalui adalah melalui twitter, facebook, tiktok, dan instagram. Jenis media ini paling akrab dengan anak muda. Melalui berbagi *hashtag* atau tagar informasi yang didiskusikan, informasi penolakan politik dinasti secara cepat menjadi viral dan mendorong massa untuk andil terlibat ke dalam aksi. Ruang virtual memungkinkan respons instan terhadap berbagai isu-isu kontroversial tentang politik dinasti. Anak muda, yang salah satunya diaktori oleh mahasiswa, di berbagai daerah dapat berkolaborasi. Mereka saling mendukung, berbagi sumber daya, dan serta memperkuat pesan bersama tanpa perlu bertemu secara fisik. Melalui berbagai kampanye dan pengorganisasian secara virtual, gerakan sosial penolakan politik dinasti berhasil dilakukan secara masif.

Gerakan Protes Menolak Politik Dinasti

Pemilihan presiden sebagai perwujudan demokrasi elektoral di Indonesia memberikan berbagai fakta menarik. Setiap peralihan kekuasaan menuju kepemimpinan pemerintahan baru terdapat kecenderungan kasus konflik dan gerakan aksi protes (Muliono, 2023). Bahkan, aksi protes massa yang

dilakukan menghadapi serangkaian dinamika yang kompleks dan syarat akan konflik kekerasan (Muliono, 2020). Pada konteks pemilihan presiden 2024 gerakan aksi yang dilakukan umumnya diaktori oleh mahasiswa sebagai anak muda dan didominasi oleh masalah politik dinasti. Seruan dan tagar menolak politik dinasti menjadi tren baik dalam proses pencalonan maupun dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Gerakan protes merupakan aksi kolektif yang umum ada dalam setiap gerakan sosial. Gerakan protes dimaknai secara beragam dan biasanya sebagai upaya terorganisir oleh sejumlah besar orang untuk mendorong tercapainya tujuan dari gerakan sosial itu sendiri (Noble, 2015). Dalam gerakan protes menolak politik dinasti pada demokrasi elektoral 2024 ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu *framing* dan *repertoar*. *Framing* adalah proses kompleks dan dinamis melibatkan seleksi dan interpretasi aspek realitas untuk menghasilkan definisi situasi tertentu, sifatnya dapat diperdebatkan dan dinegosiasikan, dengan menyoroti peran pembingkai situasi (Ciurel, 2023; Snow et al., 2018).

Beberapa bentuk *framing* digunakan dalam aksi protes politik adalah “Emang Boleh Sedinasti Itu?”, “MK Mahkamah Keluarga”, “Lagi Haus Kekuasaan Pakde”, “Atasi Korupsi Tinggalkan Dinasti”, “Tolak dinasti Jokowi.” Disamping itu, berbagai orasi, teatrikal, pembacaan puisi, serta nyanyian kritik atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini juga dilakukan. Mereka menuntut agar pemerintah saat ini, khususnya presiden, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti dan menghancurkan demokrasi di Indonesia. Aksi protes dalam bentuk demonstrasi ini berdasarkan data diperoleh dilakukan oleh 700 kampus lebih (lihat Meidyana, 2024; Simarmata, 2024) yang tersebar dari di berbagai daerah provinsi di Indonesia.

Gerakan ini menyoroti tidak hanya sekadar tuntutan terhadap dominasi keluarga dalam monopoli kekuasaan, tetapi juga merupakan refleksi dari kehendak merawat demokrasi. Figur-figur berasal dari keluarga dan tali kekerabatan yang dikenal sebagai penguasa di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat walikota, wakil presiden dan beberapa posisi penting lain menjadi sorotan utama gerakan aksi. Kondisi monopoli kekuasaan dianggap mewakili sistem yang tidak mewakili kepentingan rakyat secara adil dan transparan.

Aktor-aktor gerakan menolak politik dinasti berupaya memengaruhi publik tentang dampak negatif dari dominasi keluarga dalam kekuasaan pemerintahan. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih kritis. Gerakan protes menyoroti perubahan yang bersifat sistemik. Gerakan menolak politik dinasti dapat dikatakan mencerminkan semangat keadilan dan perubahan. Gerakan ini tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai hasil dari akumulasi ketidakpuasan terhadap praktik politik yang dianggap menghambat perkembangan bangsa. Berbagai aktor dengan kepekaan mereka terhadap masalah dinasti, menggalang massa di antara sesama untuk menolak hegemoni keluarga yang dianggap memonopoli kekuasaan.

Di samping *framing*, gerakan sosial menolak politik dinasti dilakukan dengan menggunakan berbagai *repertoar*. *Repertoar* dalam gerakan sosial secara konseptual mengacu kepada konsepsi dikemukakan Tilly (2006). *Repertoar* didefinisikan sebagai serangkaian cara atau strategi yang digunakan untuk memperlihatkan perlawanan terhadap suatu fenomena dan atau kebijakan tertentu (Tilly, 2006; Porta, 2013). *Repertoar* merujuk pada suatu analogi berkaitan dengan “nyanyian” gerakan yang selalu digaungkan dalam setiap aksi gerakan protes.

Repertoar dikemukakan Tilly secara konseptual mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dari berfokus pada bentuk tindakan yang diulang-ulang dalam berbagai jenis gerakan sosial menjadi konsep relasional dan interaksionis yang menekankan pengalaman orang-orang dalam interaksi yang saling bertentangan, seperti menentang kebijakan publik yang dinilai tidak adil (Alonso, 2012; Porta, 2013). *Repertoar* juga berbeda-beda dipraktikkan di berbagai rezim politik (Tilly, 2006). Perkembangan pemikiran ini mencerminkan pergeseran pemikiran Tilly dari pendekatan strukturalis dan rasionalis ke fokus pada agensi dan interpretasi dalam aksi protes. *Repertoar* dalam studi ini berupa tindakan verbal maupun non verbal yang menunjukkan perlawanan kolektif dalam aksi protes (demonstrasi) yang dilakukan untuk menuntut dihentikannya praktik politik dinasti. Dalam aksinya, mahasiswa menggunakan bentuk *repertoar* dengan menggunakan topeng “Guy Fawkes”. Topeng “Guy Fawkes” menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap telah menindas kebebasan berdemokrasi dan melanggar konstitusi negara. Gerakan *repertoar* ini merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam membangun wacana preferensi politik dan merujuk pada beragam tindakan untuk memengaruhi pandangan masyarakat tentang demokrasi elektoral tahun 2024 yang syarat dengan dominasi keluarga.

Gerakan protes dilakukan melalui teknologi informasi media sosial untuk menyoroti kepada publik tentang bahaya politik dinasti, menjelaskan dampak negatifnya terhadap kemajuan demokrasi dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran anak muda dalam gerakan ini tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga dalam membentuk opini publik, menuntut akuntabilitas dari para penguasa dan memperjuangkan reformasi struktural yang lebih adil. Dalam gerakan ini, berbagai aktor menegaskan bahwa masa depan Indonesia harus dibangun atas dasar integritas dan keadilan, bukan kepentingan keluarga dan atau hubungan tali kekerabatan. Namun pada praksisnya, gerakan ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Gerakan anti politik dinasti yang dipandang mengancam kehidupan berdemokrasi, pada kelanjutannya belum memberikan hasil yang dapat memengaruhi kebijakan dalam proses demokrasi elektoral 2024. Ini dibuktikan dengan tetap melanjutnya Gibran sebagai anak presiden sebagai wakil presiden 2024-2029.

Pertanyaan mendasar ialah mengapa gerakan sosial diaktori anak muda belum berpengaruh signifikan? Analisis studi ini menjelaskan bahwa terdapat hambatan

struktural dan kultural yang begitu signifikan. Secara historis Indonesia pada dasarnya memiliki kultur politik kerajaan dalam konstruk kekuasaan. Sistem ini secara sosiologis telah tumbuh jauh sebelum *nation-state* keIndonesiaan terbentuk. Sistem tersebut berpengaruh dan membentuk budaya politik Indonesia. Meskipun gagasan ini memerlukan riset lanjutan, namun pandangan Anderson (1972) setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar membangun argumen. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki dinasti kekuasaan yang terwujud dalam bentuk kerajaan-kerajaan (Faslah & Yanti, 2020; Vlekke & Berlian, 2008). Meskipun secara formalitas sistem nilai kerajaan ini tidak lagi ada, namun konstruk berfikir, sosiologi pengetahuannya, lebih kepada sistem dinasti yang mengutamakan tali kekerabatan atau keluarga dalam praktik kekuasaan. Kultur politik ini menjadi tantangan dan peluang dalam demokrasi dan gerakan sosial. Satu sisi sistem kultur politik dinasti akan menjadi ruang bagi berbagai gerakan sosial untuk berupaya merubahnya, dan pada sisi lain menjadi tantangan karena kuatnya sistem kultur yang telah terbentuk dalam rentang waktu yang cukup lama.

5. KESIMPULAN

Gerakan protes diaktori oleh anak muda dalam proses demokrasi elektoral tahun 2024 didorong oleh berbagai situasi berkaitan dengan isu politik dinasti. Politik dinasti pada satu segi merupakan sistem yang lahir dan tumbuh dari sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Prakti politik dinasti merupakan tantangan dan ancaman terhadap eksistensi demokrasi karena sistem kedaulatan atau akumulasi kekuasaan lebih tersentral kepada sekelompok keluarga. Kondisi ini menghadirkan rasa ketidakadilan dan sekaligus sebagai ancaman terhadap eksistensi demokrasi. Studi ini menunjukkan bahwa gerakan protes dilakukan hampir 700 lebih kampus tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan protes turun ke jalanan dominan diaktori oleh anak-anak muda khususnya dari kalangan mahasiswa. Gerakan sosial yang dilakukan melibatkan berbagai *framing* dan *repertoar* dalam membangun narasi menolak politik dinasti dan menuntut adanya perubahan yang bersifat sistemik. Sebagai anak muda yang hidup pada era perkembangan teknologi media dan infromas, aktor-aktor dalam gerakan sosial ini menggunakan media sosial sebagai alat mobilisasi massa. Studi ini juga menyimpulkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan menghadapi tantangan yaitu kuatnya sistem kultur kekuasaan dan dinamika demokrasi yang kompleks. Melalui dua tantangan ini gerakan protes terhadap penolakan politik dinasti yang dilakukan belum begitu kuat memengaruhi dan merubah sistem politik yang dikehendaki massa.

Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian tentang gerakan sosial baru dengan fokus pada anak muda sebagai aktor dan serta kajian tantangan dalam gerakan sosial pada konteks demokrasi di Indonesia. Bagaimanapun, penelitian yang dilakukan dalam studi ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini terbatas pada perspektif framing dan repertoar dalam studi gerakan

sosial. Pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan utama gerakan sosial terkait sistem budaya kekuasaan yang memengaruhi praktik kekuasaan di Indonesia pada era demokrasi saat ini masih diperlukan untuk penelitian lebih lanjut. Dalam studi demokrasi, budaya politik memainkan peran penting dalam membentuk konsep kekuasaan. Sejalan dengan hal tersebut, pengaruh dan sekaligus tantangan dan atau hambatan dari sistem budaya kekuasaan memerlukan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alonso, A. (2012). Repertório, segundo Charles Tilly: História de um conceito. *Sociologia & Antropologia*, 2(3), 21–41. <https://doi.org/10.1590/2238-38752012v232>
- Ananda, A. I. (2023). The influence of political dynasty on the democracy climate. *Constitutional Law Society*, 2(1), 9–17. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.37>
- Anderson, B. R. O. (1972). *The Idea of Power in Javanese Culture*. Cornell University. <https://sci-hub.se/downloads/2019-12-17/57/anderson2019.pdf>
- Asrul, F.R., Wijayanto, Hidayat, N.H. (2024). Dinamika gerakan konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 71-77. https://drive.google.com/file/d/1N3WyINacId_GA5bss7NefRrvPP9YRkx5/view.
- Bublitz, M. G., Escalas, J. E., Lteif, L., Nardini, G., Peracchio, L. A., Rank-Christman, T., & Woodrow, S. (2024). We're on the rise: How social movements support youth well-being. *Journal of the Association for Consumer Research*, 9(2), 143–154. <https://doi.org/10.1086/728645>
- Buechler, S. M. (2015). New social movement theory. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosn022.pub2>
- Buechler, S. M. (2019). New social movement theory. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Wiley.
- Ciurel, D. (2023). The framing of protest. *Professional Communication and Translation Studies*, 11, 7–15. <https://doi.org/10.59168/BFJJ3729>
- Chock, C. S. (2012). Youth and social movements: Key lessons for allies. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2199531>
- Earl, J., Maher, T. V., & Elliott, T. (2017). Youth, activism, and social movements. *Sociology Compass*, 11(4). <https://doi.org/10.1111/soc4.12465>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti politik dalam pemerintahan lokal studi kasus dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Faslah, R., & Yanti, N. (2020). Kerajaan Islam : Sejarah politik islam klasik di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.41>

- Grinspun, D., Wallace, K., Li, S.-A., McNeill, S., Squires, J. E., Bujalance, J., D'Arpino, M., De Souza, G., Farshait, N., Gabbay, J., Graham, I. D., Hutchinson, A., Kinder, K., Laur, C., Mah, T., Moore, J. E., Plant, J., Ploquin, J., Ruitter, P. J. A., ... Zhao, J. (2022). Exploring social movement concepts and actions in a knowledge uptake and sustainability context: A concept analysis. *International Journal of Nursing Sciences*, 9(4), 411–421. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.08.003>
- Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J., Giugni, M. (1995). *New social movements in Western Europe. A comparative analysis*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203501115>
- Lee, S. (2020). Social media use and social movements and protests. In *The International Encyclopedia of Media Psychology* (pp. 1–6). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119011071.iemp0316>
- Martínez-López, R., Bemol-Ambrosio, L., & Sumano-Ramírez, E. (2022). Ser joven y movimientos sociales. *Ra Rió Guendaruyubi*, 5(14), 30–46. <https://doi.org/10.53331/rar.v5i14.4717>
- Mei, E. (2021). Youth-led social identity and movements: A case study of youth activism in Hong Kong. *Aleph, UCLA Undergraduate Research Journal for the Humanities and Social Sciences*, 18(1). <https://doi.org/10.5070/L618154799>
- Meidyana, A. (2024). Demo tolak dinasti politik & pelanggaran ham bergema di sejumlah daerah. *MetroTvnews.Com*. <https://www.metrotvnews.com/play/b3JCr22Y-demo-tolak-dinasti-politik-pelanggaran-ham-bergema-di-sejumlah-daerah>
- Meliala, F.C.D. & Permana, P.A. (2023). Competitive threats to political dynasty in Indonesia: The failure of the Yasin Limpo family in the 2018 South Sulawesi gubernatorial election. *Jurnal Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v9i1.1139>
- Miller, K. K., Shramko, M., Brown, C., & Svetaz, M. V. (2021). The election is over, now what? Youth civic engagement as a path to critical consciousness. *Journal of Adolescent Health*, 68(2), 233–235. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.10.033>
- Muliono. (2023). Masyarakat pasca-konflik: Studi transformasi konflik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNJA*, 7(2), 176–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.29484>
- Muliono, M. (2020). Pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>
- Noble, C. (2015). Social Protest movements and social work practice. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 518–524). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.28085-9>
- Porta, D. D. (2013). Repertoires of contention. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm178>
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan sosial baru indonesia: Reformasi 1998 dan proses demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Simarmata. (2024). *Mahasiswa Indonesia bersatu dari 899 kampus serentak bagikan 4 juta lembar selebaran tolak politik dinasti*. <https://www.beritasatu.com/network/medanbisnisdaily/84285/mahasiswa-indonesia-bersatu-dari-899-kampus-serentak-bagikan-4-juta-lembar-selebaran-tolak-politik-dinasti>
- Snow, D. A., Vliegenthart, R., & Ketelaars, P. (2018). The framing perspective on social movements. In *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (pp. 392–410). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch22>
- Tilly, C. (2006). *Regimes and repertoires*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226803531.001.0001>
- Vlekke, B.H., & Berlian, S. (2008). *Nusantara sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.3>
- Xinyue, D. (2023). Social media as a tool for political mobilization: A case study of the 2020 Hong Kong protests. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 3(1), 9–12. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v3i1.199>
- Zeller, D. R. (2022). Social movements. In *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (pp. 534–543). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00258-2>